

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap negara, perencanaan pembangunan baik di lingkup nasional, maupun wilayah harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi wilayah. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011).

Hudiyanto (2013) menyatakan bahwa kemandirian merupakan prasyarat bagi pembangunan. Kemandirian ditunjukkan pada sejauh mana bangsa itu bisa membiayai pembangunan secara mandiri. Pembangunan sendiri merupakan aktifitas yang diinisiasi dan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan swasta baik dunia bisnis maupun warga masyarakat. Dalam kaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah, kemandirian bisa dilihat dari sejauh mana anggaran belanja bisa dibiayai dari sumber dalam negeri berupa berbagai macam pajak.

Pembangunan pada era otonomi daerah juga menitikberatkan pada kemandirian daerah untuk menggali dan mengelola potensi yang ada di masing-masing daerah. Sejalan dengan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka kewenangan daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan daerahnya semakin luas. Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan suatu daerah.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang mengarah ke desentralisasi, maka proses pembangunan di daerah hendaknya disesuaikan dengan potensi, kondisi dan kemampuan masing-masing daerah, di samping tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi nasional dan dinamika ekonomi internasional (Ma'ruf, 2009).

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan dan

menyeraskan laju pertumbuhan antar daerah, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan yang akan disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan yang diwujudkan di dalam pola pembangunan. Dari segi perencanaan pembangunan pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yaitu: (i) aspek makro; (ii) aspek sektoral; (iii) aspek regional. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dipadukan dengan sebaik-baiknya agar mencapai hasil optimal (Sukirno, 1994).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 diarahkan untuk mewujudkan visi sebagai Kabupaten Magelang yang maju, sejahtera, dan madani. Salah satu misi yang dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut yaitu dengan cara membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang maju di Indonesia; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi (potensi lokal) daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; semakin meningkatnya kualitas pelayanan lebih bermutu; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok didukung dengan swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan

pangan pada tingkat masyarakat; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Magelang saat ini baik yang sudah digali maupun belum digali merupakan modal dasar bagi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang. Potensi-potensi yang ada bila tidak mendapat perhatian khusus, selamanya akan menjadi potensi saja, bukan keluaran produknya yang penting. Kabupaten Magelang secara geografis memiliki letak yang strategis, karena merupakan jalur perlintasan dari Jawa Tengah ke Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu juga menjadi perlintasan jalur darat dari Jawa Tengah bagian Utara ke Jawa Tengah bagian Tengah maupun Selatan, serta dari Jawa Tengah bagian Barat ke Timur maupun sebaliknya. Oleh karena itu Kabupaten Magelang merupakan daerah yang memiliki intensitas transportasi tinggi, sehingga berperan penting dalam pengembangan perekonomian regional. Maka diperlukan kesiapan daerah dalam mengembangkan wilayah dan untuk mencapai tujuan tersebut, sudah seharusnya Kabupaten Magelang dalam menggali informasi lebih mengandalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut baik berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal.

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan aktif bagi pendapatan regional Kabupaten Magelang. Secara geografis, Kabupaten Magelang merupakan daerah agraris, maka kontribusi terbesar pada PDRB

didominasi oleh sektor pertanian. Proses pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya transformasi struktural di Kabupaten Magelang yang menyebabkan pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Tabel 1.1.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang
Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010, 2012 – 2014 (Jutaan Rupiah)

Sektor	Tahun					
	PDRB (Jutaan Rupiah)			Kontribusi (%)		
	2012	2013*	2014**	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3827627,05	3852303,18	3757550,06	24,12	23,70	22,46
Pertambangan dan Penggalian	667027,11	706372,16	733153,9	3,90	3,85	4,24
Industri Pengolahan	3190670,17	3634646,89	3953822,56	20,75	21,67	22,31
Pengadaan Listrik dan Gas	10132,17	10907,25	11369,25	0,06	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18133,32	18080,11	18207,38	0,10	0,10	0,09
Konstruksi	1526541,01	1619322	1703117,51	9,30	9,23	9,37
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2400862	2520051,09	2613142,41	14,57	14,25	13,74
Transportasi dan Pergudangan	570460,06	629418,41	692577,24	3,21	3,24	3,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	643002,72	663721,12	712338,27	3,95	3,94	4,03
Informasi dan Komunikasi	618502,09	674692,39	782287,91	3,41	3,22	3,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	416810,09	431201,45	457182,42	2,65	2,61	2,66
Real Estat	322168,18	348473,8	368673,6	1,84	1,81	1,84
Jasa perusahaan	34207,81	39434,21	42837,31	0,21	0,22	0,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	627980,45	645103,58	649393,68	3,96	3,87	3,69
Jasa Pendidikan	748437,47	798857,86	880653,17	5,28	5,50	5,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113768,65	120345,05	136202	0,72	0,72	0,77
Jasa Lainnya	334812,21	370678,16	403300,8	1,96	2,02	2,12
PDRB	16071142,6	17083608,71	17915809,49	100,00	100,00	100,00

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2014

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Magelang merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi paling besar terhadap struktur PDRB total, namun setiap tahunnya kontribusi sektor pertanian selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,12 persen dan pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian turun menjadi 22,46 persen. Sektor dominan setelah pertanian yang berkontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini karena terjadi perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Magelang yang ditandai dengan menurunnya pangsa sektor primer (pertanian), meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa). Aspek penting yang lain dari perubahan struktural adalah dilihat dari sisi ketenagakerjaan, bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dan transfer tenaga kerja dari sektor yang produktivitas tenaga kerjanya rendah ke sektor yang produktivitas tenaga kerjanya tinggi.

Tabel 1.2.
 Persentase Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas
 Yang bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan
 Utama dan Jenis Kelamin, 2013 dan 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	2013		Laki-laki + Perempuan	2014		Laki-laki + Perempuan
	Jenis Kelamin			Jenis kelamin		
	L	P	L	P		
1. Pertanian	20.94	16.96	37.90	39,63	37,86	38,94
2. Pertambangan dan Penggalian	0.97	0.00	0.97	1,56	0,16	1,01
3. Industri	8.39	7.69	16.08	12,53	13,97	13,09
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	0.09	0.00	0.09	0,43	0,00	0,26
5. Bangunan	9.01	0.09	9.10	10,91	0,16	6,71
6. Perdagangan dan Hotel	7.60	11.04	18.64	13,80	30,17	20,20
7. Angkutan dan Komunikasi	2.30	0.09	2.39	6,06	0,00	3,69
8. Keuangan	0.18	0.44	0.62	1,77	0,69	1,35
9. Jasa-jasa	7.42	6.01	13.43	13,32	16,99	14,75
10. Lainnya	0.35	0.44	0.80	-	-	-

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2015

Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2013 sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 37,90 persen. Dan pada tahun 2014 sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 38,94 persen. Sektor dominan setelah pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magelang adalah pada sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa dan sektor industri.

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Tanggung jawab ideal dari dunia kerja adalah bagaimana dapat menyerap sebesar-besarnya tambahan angkatan kerja yang terjadi

setiap tahun, dengan tetap memperhatikan peningkatan produktivitas pekerja secara keseluruhan. Sebab dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan upah juga meningkat sekaligus kesejahteraan pekerja dapat diperbaiki. Perubahan struktural tersebut juga memberikan dampak tidak langsung terhadap perubahan struktur ketenagakerjaannya. Ketidakserasian antara perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, secara umum akan menimbulkan kelemahan pada sistem penawaran dan permintaan tenaga kerja. (Hasani, 2010).

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi dan potensi sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Magelang maka penulis mengambil judul “ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2014”

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya perubahan pergeseran kontribusi PDRB, struktur perekonomian di Kabupaten Magelang mengalami perubahan. Dari uraian tersebut maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja perekonomian daerah Kabupaten Magelang berdasarkan pendekatan shift share dilihat dari kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Magelang.
2. Sektor apa saja yang menjadi basis dan non basis melalui analisis LQ untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang.
3. Sektor apa saja yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah baik eksternal maupun internal di Kabupaten Magelang menggunakan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).
4. Sektor atau kegiatan ekonomi apa yang potensial di Kabupaten Magelang dengan menggunakan analisis overlay.
5. Sektor apa saja yang termasuk sektor maju dan tumbuh pesat melalui analisis Tipologi Klassen.
6. Bagaimana strategi kebijakan yang tepat untuk membangun Kabupaten Magelang yang berbasis sektor unggulan daerah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah Kabupaten Magelang berdasarkan pendekatan shift share dilihat dari kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis dan non basis melalui analisis LQ untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui sektor yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah baik eksternal maupun internal di Kabupaten Magelang menggunakan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).
4. Untuk mengetahui Sektor atau kegiatan ekonomi yang potensial di Kabupaten Magelang dengan menggunakan analisis overlay.
5. Untuk mengetahui sektor-sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat melalui analisis Tipologi Klassen.
6. Untuk mengidentifikasi strategi kebijakan yang tepat dalam membangun Kabupaten Magelang yang berbasis pada sektor unggulan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Untuk menambah wawasan, serta dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan praktis dan empiris dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan dalam perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

3. Bagi Pembaca.

Penelitian ini merupakan bahan informasi sebagai kajian dan referensi untuk permasalahan yang sama, dan diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.